

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. RAKHMADI, S.Sos.

Jabatan : KEPALA BADAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.



H. RAKHMADI, S.Sos.

Pembina (IV/a)

NIP. 196601072000121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Tingkat	82
2	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	250
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	3
4	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
5	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100

6	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
8	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
9	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
11	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
12	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2

13	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
14	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
15	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
16	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
17	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100
18	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.502.098.000,00	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.983.972.043,00	APBD
3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.359.385.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		33.845.455.043,00	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN



H. RAKHMADI, S.Sos.
Pembina (IV/a)
NIP. 196601072000121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUHADA**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. RAKHMADI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
3. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
9. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di bidangnya;

10. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
11. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
12. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
13. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAHMADI, S.Sos
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS



Drs. SUHADA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86
2	Tersusunnya dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	19
3	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15
4	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	2
5	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2
6	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7
7	Meningkatnya Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
8	Tersedianya waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12
9	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	12
10	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKP5DM	Nilai	82
11	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
12	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
13	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100

14	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
15	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
16	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
17	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
18	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
19	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
20	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
21	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100
22	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.000.000,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.808.511.475,00	APBD
3.	Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	44.840.000,00	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.000.000,00	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.061.000.000,00	APBD

6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	434.426.000,00	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	960.194.568,00	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		22.983.972.043,000	APBD

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA

H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Drs. SUHADA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOKO WIDIARTO, S.Sos**

Jabatan : **Plt.KEPALA BIDANG PENGADAAN,PEMBERHENTIAN,DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.RAKHMADI,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
9. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

10. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program dan kegiatan di bidangnya;
11. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
12. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
13. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
**Plt.KEPALA BIDANG
PENGADAAN,PEMBERHENTIAN,DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN**



IKO WIDIARTO, S.Sos
PENATA TKJ (III/D)
NIP. 19651101 200012 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	93
2.	Terlaksananya pengadaan dan pemberhentian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	ASN	1.147
3.	Meningkatnya pelayanan pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi lembaga profesi ASN	Persentase permohonan layanan pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi lembaga profesi ASN yang selesai sesuai SOP	Persen	72,50
4.	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian terupdate/terbarukan	Persen	75,50
5.	Tersedianya data Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Data Pegawai menurut pendidikan PT ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Laporan	1
6.	Tersedianya seluruh data pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Data Pegawai menurut pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Laporan	1
7.	Tersedianya data pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Data pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	Laporan	1
8.	Tersedianya data seluruh pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Data seluruh pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Laporan	1
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai	82
10.	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	54,50
11.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
12.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100

13.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
14.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
15.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
16.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
17.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
18.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
19.	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
20.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
21.	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
22.	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1.278.324.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		1.278.324.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
Plt.KEPALA BIDANG
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN



JOKO WIDIARTO, S.Sos
PENATA TK.I (III/D)
NIP. 19651101 200012 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROKIP, S.STP., M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H.RAKHMADI,S.Sos

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
9. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

10. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program dan kegiatan di bidangnya;
11. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
12. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAKHLAK";
13. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
16. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
17. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAHMADI, S.Sos
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR**



ROKIP, S.STP., M.Si
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19860412 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	ASN	734
2.	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Tingkat Pengembangan kompetensi ASN	Persen	34,17
3.	Meningkatnya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persen	20,65
4.	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	ASN	370
5.	Terlaksananya Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	ASN	413
6.	Tersedianya data pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Data pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Laporan	1
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai	82
8.	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	88
9.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	2
10.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
11.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100

12.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
13.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
14.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
15.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
16.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
17.	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
18.	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader dan Tim budaya kerja	Kegiatan	4
19.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
20.	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
21.	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Pengembangan Kompetensi ASN	2.916.061.000,00	APBD
2.	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.750.000.000,00	APBD
3.	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	3.752.098.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		8.418.159.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA


H. RAHMADI, S.Sos
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR**


ROKIP, S.STP., M.Si
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19860412 200412 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOPFIYANTO RAMADHAN, S.IP
Jabatan : KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H.RAKHMADI,S.Sos
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Meningkatkan Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
9. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program dan kegiatan di bidangnya;

10. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
11. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
12. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG MUTASI DAN
PROMOSI**



MOPFIYANTO RAMADHAN, S.IP
PENATA TK I (III/D)
NIP. 19880409 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	ASN	2.928
2.	Meningkatnya layanan mutasi dan promosi yang selesai sesuai SOP	Persentase permohonan layanan mutasi dan promosi yang selesai sesuai SOP	Persen	75
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai	82
4.	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	65
5.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
6.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
7.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
8.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
9.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
11.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2

12.	Melaksanakan revid awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Revid Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
14.	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Mutasi dan Promosi	625.000.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		625.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA


H. RAKHMADI, S.Sos
 PEMBINA (IV/A)
 NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI


MOPFIYANTO RAMADHAN, S.IP
 PENATA TK. V (III/D)
 NIP. 19880409 200701 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. ACHMAD JAIS, SE., M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H.RAKHMADI,S.Sos

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.
2. Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
7. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang.

9. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program dan kegiatan di bidangnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
14. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak Kedua,
KEPALA



H. RAKHMADI, S.Sos
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19660107 200012 1 003

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN PENGHARGAAN**



Dr. ACHMAD IAIS, SE., M.Si
PEMBINA TK.3 (IV/B)
NIP. 19700405 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	ASN	12.607
2.	Meningkatnya Prestasi Kinerja ASN	Persentase ASN yang memiliki SKP dengan Predikat Baik Keatas	Persen	78
3.	Tercapainya Tingkat penyelesaian kasus disiplin kepegawaian	Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan	Persen	77
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai	82
5.	Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara	Indeks Sistem Merit	Nilai	102
6.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
7.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
8.	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
9.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
10.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
11.	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1

12.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
13.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
14.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
15.	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
16.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
17.	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD/APBN)
1.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	540.000.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		540.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA

H. RAKHMADI, S.Sos
 PEMBINA (IV/A)
 NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN PENGHARGAAN

Dr. ACHMAD JAIN, SE., M.Si
 PEMBINA TK. I (IV/B)
 NIP. 19700405 200012 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERU SETIAWAN, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SUHADA**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
9. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di bidangnya;
12. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
13. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
14. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA

PENATA TK. I (III/D)

NIP. 19651005 198703 1 002

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN**


HERU SETIAWAN, SE

PENATA TK. I (III/D)

NIP. 19770530 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	2
2	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
3	Terlaksananya pengadaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3
4	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3
5	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1.277
6	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1
7	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
8	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	450
9	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	31
10	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15
11	Terlaksananya pengiriman surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
12	Terlaksananya pembayaran rekening air, telepon dan jasa internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
13	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1
14	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1

15	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12
16	Terlaksana & Terlaporkannya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
17	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka & bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif & akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
18	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
19	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
20	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
21	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
22	Terlaksananya percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
23	Terlaksananya Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
24	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
25	Terlaksananya Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan dan Pemenuhan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100
26	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	APBD
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	APBD
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000,00	APBD
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000,00	APBD
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.000.000,00	APBD
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.000.000,00	APBD
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,00	APBD
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	334.426.000,00	APBD
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	APBD
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000,00	APBD
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	APBD
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.057.000,00	APBD
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.137.568,00	APBD
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		2.755.620.568,00	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA

PENATA TK. I (III/D)
 NIP. 19651005 198703 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN



HERU SETIAWAN, SE
 PENATA TK. I (III/D)
 NIP. 19770530 199703 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. ASRI, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SUHADA

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
3. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
4. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
5. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
6. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
7. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
8. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program dan kegiatan di bidangnya;
9. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
10. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;

11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

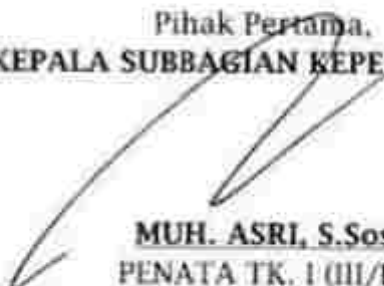
Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA

PENATA TK. I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

Pihak Pertama,
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN


MUH. ASRI, S.Sos

PENATA TK. I (III/D)
NIP. 19661029 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
2	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN	ASN	50
3	Tersusunnya Laporan Absensi ASN BKPSDM	Jumlah Rekapitulasi Absensi ASN BKPSDM	Dokumen	1
4	Tersusunnya Laporan Harian Kerja ASN BKPSDM	Jumlah Laporan Harian Kerja ASN BKPSDM	dokumen	1
5	Terlaksananya pelayanan administrasi cuti bagi ASN BKPSDM	Laporan pelayanan administrasi cuti bagi ASN BKPSDM	Laporan	1
6	Terlaksananya pelayanan administrasi kenpa dan pensiun bagi ASN BKPSDM	Laporan pelayanan administrasi kenpa dan pensiun bagi ASN BKPSDM	Laporan	1
7	Terlaksananya pelayanan administrasi KGB bagi ASN BKPSDM	Laporan pelayanan administrasi KGB bagi ASN BKPSDM	Laporan	1
8	Tersusunnya laporan SKP ASN BKPSDM	Jumlah rekapitulasi SKP ASN BKPSDM	Dokumen	1
9	Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan BKPSDM	Menyusun Daftar Urut Kepangkatan	Dokumen	1
10	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
11	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
12	Terpenuhinya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
13	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHDAN, SE

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SUHADA

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
3. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
4. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
5. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di bidangnya;
6. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini;
7. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
8. Menyajikan Data Rancangan Awal Rencana Kerja pada aplikasi SIPD RI;
9. Menyajikan Data Paket Pekerjaan pada Aplikasi e-RPJMD Kutai Kartanegara;
10. Menyajikan Data Rancangan Akhir Rencana Kerja pada Aplikasi SIPD RI;

11. Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
12. Menyusun Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah;
13. Menyusun Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
14. Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN;
15. Menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
16. Memverifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah;
17. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
18. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA


MUKHDAN, SE
PENATA (III/C)
NIP. 19740707 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data Rancangan Awal Rencana Kerja pada Aplikasi SIPD RI	Jumlah Sub Kegiatan Yang Diinput pada Aplikasi SIPD RI	Data	44
2	Tersedianya Data Paket Pekerjaan pada Aplikasi e-RPJMD Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pekerjaan yang diinput pada Aplikasi e-RPJMD Kutai Kartanegara	Data	71
3	Tersedianya Data Rancangan Akhir Rencana Kerja pada Aplikasi SIPD RI	Jumlah Sub Kegiatan Yang Diinput pada Aplikasi SIPD RI	Data	44
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10
5	Tersedianya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	5
6	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	
8	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	25
9	Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah yang diverifikasi	Dokumen	1875
10	Terwujudnya Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN per tanggal 31 Maret 2023.	Persen	100
11	Terlaksananya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
12	Terpenuhinya Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Panatu	Persen	100
13	Terlaksananya Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Minimal 10 Januari	Laporan	2

14	Terlaksananya reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
15	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000,00	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000,00	APBD
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.663.511.475,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	95.000.000,00	APBD
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.840.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		20.038.351.475,00	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. SUHADA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19651005 198703 1 002

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA


MUKHDAN SE
PENATA (III/C)
NIP. 19740707 199803 1 005